



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNTUR HAFID
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 197427

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	738.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/135 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000		
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/96 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	284.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER EXCEED MT MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SE88 125 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	83.000.000
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.249.882
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.128.249.882
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.128.249.882

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.